

Pemanfaatan Barang Gadai

Utilization of Pawn Items

Fatma

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*)Email Korespondensi: fatma0998@gmail.com

Abstrak

Barang gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (Yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Namun demikian, dalam prakteknya masih banyak yang menyalahgunakan barang gadai sehingga diperlukan pemahaman lebih dalam tentang barang gadai tersebut agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam.

Kata Kunci: Barang Gadai, Hukum Pemanfaatan

Abstract

Pawned goods are not included in the contract of transfer of property rights, strictly speaking, it is not the ownership of an object nor is it the level of the benefits of an object (lease), but only a guarantee for a debt or debt, that's why scholars agree that the property rights and benefits of an object that is used as a mortgage collateral (Marhun) is on the side of rahin (who pawns). The murtahin (who receives the pawned goods) may not take advantage of the pawned goods unless permitted by the rahin and the pawned goods are not animals. However, in practice there are still many who misuse the pawned goods so that a deeper understanding of the pawned goods is needed so as not to fall into acts that are prohibited by Islam.

Keywords: Pawn Goods, Utilization Law

PENDAHULUAN

Selaku makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain (1). Oleh sebab itu kerjasama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa dalam berbagai bentuk termaksud uang. Padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu permisalan alternatif tersebut ialah dengan menggadaikan barang.

Islampun sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk) (2). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah-satunya, yaitu dalam hutang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan (3).

Munculnya banyak lembaga peminjaman (atau perseorangan) dengan jaminan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta, menjadi bukti adanya transaksi gadai di tengah masyarakat. Perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia, tetapi sudah lama berlangsung. Yang kadang tak bisa dihindari, yaitu akibat yang ditimbulkan dari transaksi gadai ini, yakni adanya perbuatan zhalim dan saling memakan harta dengan cara batil.

Berkaitan dengan fakta ini, maka muncullah beberapa pertanyaan yang akan dibahas pada makalah berikut ini. Antaralain adalah sebagai berikut : Bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin bila ditinjau dari hukum Islam? Serta apakah pendapat para ulama mengenai pemanfaatan barang bagai?

METODE

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (4). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumntasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ar-Rahn yang berarti : al-tsubut (tetap) dan al-habs (tahanan). (Muhammad Abu Bakar ar Razi, Mukhtar as Shihah, Kairo, Dar al Hadist, 2002 M, hlm: 151). Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala: "Tiap- tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya" (5).

Adapun Gadai secara Istilah bisa diartikan: pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman) (6).

Dalam literature Fiqh, Gadai (arRahn) diartikan dengan: menjadikan barang sebagai jaminan dari hutang, sebagai pengganti jika hutang tersebut tidak bisa dibayar (7). Dasar Pegadaian adalah firman Allah Ta'ala: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (8). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Dalil dari as-sunnah adalah hadist Aisyah Ra, bahwasanya ia berkata: "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi yang akan dibayar pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikannya dengan baju besinya" (9).

Pemanfaatan Barang Gadai

Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (Marhun) berada dipihak rahin (yang menggadaikan). Murtahin (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh rahin dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ualam-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw. Tentang manfaat barang gadai adalah milik rahin bukan milik murtahin.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi murtahin sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya (10). Lebih lanjut Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mugny menjelaskan bahwa pengambilan manfaat dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu : Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya. (barang tetap) Yang membutuhkan pembiayaan. (barang bergerak) .

Mengenai hukum penerima gadai dengan mengambil manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan seizin yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain (10).

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya., terutama bagi hewan yang bisa diperah dan ditunggangi. Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya imbalan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut. Dalam kitab al-Mugny, Imam Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: Penerima gadai tidak boleh mengambil hasil atau manfaat dari barang yang digadaikan sedikit pun kecuali dari yang bisa ditunggangi dan diperah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali bagi barang gadaian yang bisa ditunggangi dan diperah. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh mengambil manfaat dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya (11). Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, Rahmat Syafi'i mengatakan : Bahwa Murtahin boleh mengambil manfaat barang gadai sepanjang diizinkan oleh rahin, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni murtahin boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh murtahin.

Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedhaliman (aniaya) pada salah satu pihak, sebagaimana firman Allah swt. Yang Terjemahnya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka

ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu ; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiyaya.

Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman,

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan

Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumbuh ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Uraianya adalah sebagai berikut.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin pemegang gadai, begitu pula pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin orang yang menggadaikan. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh pemegang gadai selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat yang ada dalam barang gadai pada dasarnya termasuk gadai/rahn.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemegang gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, akad menjadi batal. Adapun pemegang gadai dibolehkan memanfaatkan barang gadai sekadarnya (tidak boleh lama) itu pun atas tanggungan orang yang menggadaikan. Sebagian ulama Malikiyah berpendapat, jika pemegang gadai terlalu lama memanfaatkan barang gadai, ia harus membayarnya. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu membayar. Pendapat lainnya diharuskan membayar, kecuali jika orang yang menggadaikan mengetahui dan tidak mempermasalahkannya.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, orang yang menggadaikan harus meminta izin kepada pemegang gadai.

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis cenderung setuju kepada pendapat yang tidak memperbolehkan orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai kecuali telah mendapatkan izin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebab itu merupakan kekuasaan pemegang gadai.

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai

Pendapat Imam Syafi'i tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada suatupundi barang jaminan itu bagi yang menerima gadai". Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'i, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya".

Menurut Imam Syafi'i bahwa pihak yang harus bertanggung jawab bila barang jaminan gadai rusak atau musnah adalah pihak yang menggadaikan, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggungjawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari barang gadai.

Ulama Malikiyah memperbolehkan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh orang yang menggadaikan atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya., meskipun memperoleh izin dari orang yang menggadaikan barang, bahkan mengategorikannya sebagai riba. Dan menurut sebagian ulama Hanafiyah, barang gadai boleh untuk diambil manfaatnya oleh pemegang gadai apabila telah mendapat izin dari orang yang menggadaikan barang.

Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpendapat, apabila barang gadai dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang gadai, maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut. Kemudian jika setiap saat orang yang menggadaikan barang harus datang kepada pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadai, maka akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap waktu pemegang gadai harus memelihara dan menyerahkan manfaat barang gadai kepada orang yang menggadaikan barang. Jadi, pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadaian itu atas seizin pemiliknya. Sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk pegadai dapat mengambil manfaat dan tidak termasuk riba.

Menurut ulama Hanabilah, jika barang gadai berupa hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang menggadaikan barang. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin orang yang menggadaikan barang (12).

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis cenderung mengikuti pendapat yang memperbolehkan pemegang gadai untuk memanfaatkan barang gadai, dengan izin orang yang menggadaikan, akan tetapi hanya bersifat pemeliharaan seperti hewan, maka diperlukan makanannya, atau juga seperti sawah atau ladang diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif). Dan hal yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pemegang gadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam, karena hal demikian mengandung riba. Karena bisa dengan solusi hasilnya dapat dibagi antara orang yang menggadaikan dan pemegang gadai, atas kesepakatan bersama. Adapun barang gadai selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan seperti emas, kendaraan, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara bahasa rahn berarti tetap dan lama, sedangkan secara istilah rahn adalah penetapan sebuah barang yang memiliki nilai finansial dalam pandangan syariat sebagai jaminan bagi utang di mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengannya. Landasan hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunah, seperti QS. Al-Baqarah ayat 283, HR. Bukhari dan Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

1. Handayani ES. Pemanfaatan barang gadai: studi komparatif hukum Islam dan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia. 2011;
2. Rustam R, Haris ZA. Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi. Deepublish; 2018.
3. Batubara M. Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayar Hutang Menurut Sayyid Sabiq (Studi Kasus Di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; 2018.
4. Sugiarto E. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media. Diandra Kreatif; 2017.
5. Yasin M, Huzaini M, Jufri A. Praktik Gadai Lahan Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Al-Rahin Di Desa Gapura Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. J Econ Bus. 2018;4(1):58–66.
6. Poerwadarminta WJS. Kamus umum bahasa Indonesia. Balai pustaka; 1952.
7. Wulandari W. Iddah wanita yang mengalami abortus perspektif kitab mughni Al-Muhtaj dan Mukhtash Khalil. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; 2020.
8. Lutfiyah M. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Fatwa DSN nomor: 26/DSN-

- MUI/III/2002 tentang rahn emas (studi di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Karangayu Semarang). IAIN Walisongo; 2010.
9. Seniara N. Tinjauan Sosiologis Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 (Studi Sengketa Gadai Tanah Pertanian Di Kampung Tingkem Asli Dan Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah). UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 2018.
 10. Arifin A. Perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai (di desa Krikilan kec. Sumber kab. Rembang). IAIN Walisongo; 2014.
 11. Kholifah K. Tinjauan Hukum Islam tentang Penguasaan Barang Gadai oleh Rahin (Study Kasus di Desa Kumesu Kec. Reban Kab. Batang). IAIN Walisongo; 2012.
 12. YULISTIANAH Y. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI GADAI ADAT TANPA BATAS WAKTU DI DESA GEDUNG PAKUON KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN.[SKRIPSI]. UIN RADEN FATAH PALEMBANG; 2017.